Citra Universitas dalam Era Pembangunan ; Antara Fakta dan Dilema

Oleh : Elfitra Baikoeni

Abstract

In developing countries in general, university is expected to be conceiver for the development process, from planing stage to execution and evaluation. However, university in Indonesia can not play much for the development and they role just as a supplementary element. In the essay the writer discusses the "marginal role" of the university and scientists' behavior as they are trapped in bureaucratic cycle.

I. Pendahuluan

Satu hal menarik mencermati perubahan politik pasca Orde Baru adalah keterlibatan sebagian kaum intelektual dalam konstelasi politik. Tak dapat dipungkiri, sumbangan mereka cukup signifikan dalam mengisi gagasan baru seputar demokrasi dan usaha usaha untuk terus menerus menggerakkan perubahan. Sebuah fenomena yang kontras, membandingkan posisi kaum cendikiawan dekade akhir Orde Baru dengan situasi menjelang keruntuhannya. Bahkan kalangan kampus dengan mahasiswa sebagai barisan depan merupakan lokomotif reformasi itu sendiri, yang mencapai klimaks dengan kejatuhan Jenderal Soeharto sebagai kepala negara RI kedua.

Memasuki era baru sebagai tahap transisi, semakin banyak saja para intelektual dan kalangan kampus "tergoda" memanfaatkan keterbukaan tersebut, terlepas dari nilai dan tujuan-tujuan pribadi. Motivasi dari gejala metamorfosis ini tentu bisa dijelaskan dengan berbagai daya dorong dan sejumlah daya tarik untuk memanfaatkan situasi yang serba longgar serta kondisi negara yang tidak *"established"*. Pengangkatan

BJ.Habibie sebagai presiden yang bukan saja sejak awal menimbulkan pro kontra, setelah beberapa waktu roda pemeritahan berjalan, ternyata mengindikasikan kurangnya legitimasi dari masyarakat publik sebagai prasyarat penting stabilnya sebuah pemerintah.

Disisi lain kum intelektual, baik dari kalangan umum maupun dari akademisi tidak puas hanyan sebagai pengamat dari jauh.Tidak sedikit di antara mereka merasa ikut bertanggung jawab, dan merasa terpanggil menyelamatkan bangsa ini, untuk keluar dari kemelut sesegera mungkin.Salah satu pilihan yang dianggap rasional adalah menerjuni langsung lapangan politik praktis. Tidak sedikit orang perguruan tinggi yang selama ini dikenal hanya sebagai ilmuan atau pengamat lalu mendirikan partai politik dalam menyongsong penyelenggaraan Pemilu 1999.

Melihat fenomena perubahan pasca pemilu, kita menyaksikan sejumlah paradoks dari situasi yang serba tak menentu, seakan mengawetkan streotip tentang dunia politik dengan seluk beluknya. Akhirnya ada sejumlah pertanyaan yang perlu diajukan sehubungan dengan peran intelektual kampus di masa datang dan konstelasi global yang sarat perubahan. Uraian berikut bukan kajian yang evaluatif yang mendalam, apalagi untuk menilai secara hitam putih mengenai peran yang mereka mainkan di lapangan politik serta hubungannya dengan struktur kekuasaan. Melainkan sebagai tinjauan ulang peran ideal perguruan tinggi sehubungan dengan situasi masyarakat yang terus berubah.

II. Intelektual Indonesia dan Warisan Sejarah Masa Lalu

Bila kita tinjau lembaran sejarah, kita akan mendapatkan banyak bukti terhadap peran yang gemilang yang dimainkan pemuda sebagai agen perubahan. Barangkali kita tidak akan pernah meragukan semangat idealisme generasi muda dalam mempelopori sejarah perjuangan bangsa. Begitu besarnya keperkasaan mereka dalam mendobrak sistem totaliter yang dirasakan tidak adil. Mereka menjadi pencetus dan pelopor dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Pada tahun 1908 para pemuda bangkit menggalang kekuatan dari berbagai golongan yang dikenal dengan angkatan 1908. Lalu kemudian disusul dengan angkatan 1928 sebagai generasi "Sumpah Pemuda". Angkatan 1945, yaitu angkatan

kemerdekaan, kemudian meneruskannya. Akhirnya muncul angkatan 1966 - bersama Angkatan Darat - yang melahirkan apa yang dikenal dengan Orde Baru.

Tanpa menyampingkan peran golongan lain, para pemimpin generasi muda tersebut kebanyakan adalah para intektual muda yang telah mengenyam sistem pencicikan barat. Sebagai contoh adalah kelahiran Budi Utomo sebagai generasi pergerakan pertama. Para pelopor dan pendirinya adalah mahasiswa STOVIA (Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta). Demikian juga halnya dengan tokoh-tokoh Angkatan 1928, rata-rata mereka mengecap pencicikan yang relatif tinggi pada ukuran zamannya.

Kontribusi lain dari perguruan tinggi secara khusus kita buktikan dengan kelahiran Orde Baru yang dimotori oleh Angkatan 1966. Mahasiswa yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang didukung oleh militer berhasil secara gemilang meruntuhkan rezim Orla yang dinilai otoriter dan korup. Lebih menonjol lagi pada akhir kekuasaan Orde Baru yang korup dan totaliter, gerakan kampus berjuang tanpa bantuan berarti dari elemen kenegaraan lain. Akhirnya berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang militeristik di paruh tahun 1998. Peran dan kontribusi mahasiswa serta lembaga perguruan tinggi dalam perubahan di era ini sangat kentara dan akan terdokumentasi dalam lembaran sejarah tersendiri di republik ini.

Melihat kenyataan di atas maka mahasiswa dan kampus punya "tempat khusus" dalam catatan panjang sejarah bangsa Indonesia. Peran tersebut kelihatan makin menonjol ketika krisis akibat kebijakan politik yang dijalankan. Sehingga kampus bisa menjadi satu-satunya kelompok oposisi terhadap pemerintahan yang kekuasannya begitu terlembaga pada lapisan hampir semua aspek kehidupan.

III. Universitas dan Tugas Pembangunan; Dilema Lain

Seperti umumnya negara-negara berkembang, pendidikan di Indonesia lebih diarahkan untuk menjalankan tugas-tugas pembangunan. Pendidikan melayani arah pokok pembangunan yaitu membawa masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan sebagai yang dicita-citakan. Sejak awal perencanaan pembangunan sampai kini, pembangunan di negara kita masih

menjadikan ekonomi sebagai fokus utama. Dengan demikian, pendidikan mengabdi pada fokus untuk mendukung usaha peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi bangsa.

Perguruan tinggi (PT) melihat fungsinya, juga lebih terarah untuk menghasilkan sarjana yang akan mengisi teknostruktur pembangunan yang ada. Sehingga tidak mengherankan kalau mutu sebuah perguruan tinggi lebih dilihat dari kesiapan sarjananya memasuki dunia kerja. Semakin banyak sarjana yang tertampung pada instansi dan perusahaan, maka semakin tinggi pula kualitasnya PT tersebut di mata masyarakat. Sebaliknya makin banyak sarjana mereka yang menganggur maka PT tersebut dinilai berkualitas rendah.

Melihat kenyataan yang ada, semua PT diarahkan untuk menghasilkan sarjana-sarjana terampil sebagai tenaga kerja. Tidak terkecuali halnya dengan universitas yang ikut terseret utuk menghasilkan sarjana yang jumlahnya ribuan tiap tahun untuk ditampung di pasar tenaga kerja. Maka berkembanglah universitas hampir di setiap propinsi, bahkan ibukota kabupaten. Kehadiranya tidak lebih sekedar sebuah institusi yang melayani kebutuhan tenaga-tenaga terampil untuk mengisi berbagai lowongan pekerjaan. Motivasi untuk masuk univesrsitas pun mulai berubah. Kebanyakan lamatan SLTA masuk universitas semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Padahal, pendidikan sebenarnya adalah wadah untuk memberikan prinsip-prinsip dasar pengetahuan. Jadi pendidikan bukanlah semata-mata memberikan landasan teknis keterampilan, apalagi untuk siap pakai. Soedjatmoko seorang pakar ilmuan sosial pernah mengatakan:

> "Pendidikan, terutama universitas haruslah meningkatkan kemampuan riset, haruslah berorientasi pada pengembangan pengetahuan baru agar bisa menghadapi tantangan-tantangan baru"

Selanjutnya Soedjatmoko menekankan bahwa pendidikan bisa melahirkan para intelektual muda yang dapat menangani berbagai tantangan baru pada tingkat nasional, mampu mempertahankan kepentingan nasional untuk keselamatan hidup manusia. Oleh karena itu perlu dikembangkan pengetahuan yang luas dan kemapuan yang fleksibel serta berkreativitas tinggi.

Jadi universitas bukan hanya sekedar wadah untuk melatih orang siap untuk memasuki kerja, tetapi yang lebih

penting lagi dengan landasan kognitif yang demikian dapat membaca dinamika perubahan yang terus berjalan di tengah-tengah masyarakat. Para mahasiswa harus mempunyai wawasan yang luas dan kemampuan analisis yang tajam dalam menjelaskan dan mencari solusi berbagai problem yang dihadapi masyrakat.

Ini perlu ditekankan sebagai prinsip yang membedakan antara sekolah umum dengan sekolah kejuruan pada tinggkat SLTA dan perbedaan antara universitas dan akademi, politeknik, sekolah tinggi, insitut di perguruan tinggi. Sekolah umum (seperti SMA) tidak dirancang untuk mengantarkan para siswa memasuki duunia kerja tertentu. Fungsi lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat umum ini, memberikan pengetahuan dan keterampilan akademis yang bersifat umum pula, yang diharapkan akan dapat digunakan para siswa kelak sebagai landasan dalam usaha mereka mengarungi kehidupan dalam masyarakat. Landasan semacam ini disebut landasan akademik, bedakan dengan landasan okupasional.

IV. Konsepsi tentang Universitas dan Permasalahannya

Perguruan tinggi (PT) adalah tempat pengajaran tingkat tinggi, sedang universitas adalah lembaga pendidikan tinggi yang memberikan pelajaran di berbagai ilmu dan mengadakan penelitian ilmiah yang terbagi kepada berbagai fakultas. Menurut David L Shill:

> *" Universities are organization enganged in the advancement of knowledge; they teach, train, and examine students in a variety of scholarly, scientific and professional field. Intellectual persuit in universities define the highest prevailing levels of competence in these field. The universities confer degrees and provide opportunities both for members of their teaching staff and for some their student to do original research"*

Sehubungan dengan fungsi dan peran yang harus dimainkan oleh universitas berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah dalam bidang : *pendidikan, penelitian,* dan *pengabdian kepada masyarakat*.

Tri Dharma Perguruan Tinggi, itulah sebenarnya missi bersama yang harus diwujudkan. Sehubungan dengan itu, dalam mewujudkannya harus sesuai dengan kondisi nyata masyarakat dan negara dalam kurun yang ada sekarang. Hal ini sesuai

dengan dengan prinsip dasar yang melihat gejala sosial sebagai sesuatu yang dinamis, selalu bergerak dan berubah.

Melihat fungsi tersebut, tentu saja harus dikaitkan dengan konteks masyarakat dalam artian luas, apalagi dengan misi terakhir, pengabdian kepada masyarakat. Sebab bagaimanapun juga latar belakang didirikannya perguruan tinggi adalah untuk kepentingan masyarakat.

Persoalan ini tentu saja harus betul-betul dipahami oleh segenap warga kampus, yang lebih dikenal dengan sebutan civitas akademika. Bagian penting dari civitas akademika sebuah universitas adalah unsur pimpian, staf pengajar (dosen) dan mahasiswa. Masing-masing komponen tersebut harus bisa memahami arti Tri Dharma Perguruan Tnggi dengan segala makna yang ada di dalamnya.

Secara umum di mata masyarakat, orang-orang kampus merupakan kaum cerdik pandai yang mampu mengatasi berbagai masalah sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik ilmu alam, maupun ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Mereka adalah kaum intelektual yang diharapkan sebagai *problem solver* terhadap persoalan di sekitarnya. Makna intelektual dalam hal ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang merasa bekepentingan untuk memikirkan secara rasional dan sepanjang pengetahuannya tentang bagaimana suatu masyarakat atau umumnya manusia dapat hidup lebih baik.

Secara konseptual ada sedikit perbedaan pengertian antara intelektual dengan ilmuan. Ilmuan (spesialis) adalah seorang yang ahli dan banyak pengetahuanya mengenai satu bidang disiplin ilmu atau orang-orang yang berkecimpung pada suatu ilmu. Jadi ilmuan hanya menekuni sebuah disiplin pengetahuan dan menghabiskan waktunya untuk pengembangan ilmu.

V. Dilema Peran dan Fungsi Universitas

Sehubungan dengan fungsi universitas, tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang apa dan bagaimana peran kaum akademis untuk masyarakat. Pertanyaaan ini mungkin bisa dijawab dengan melihat pengertian lebih jauh lagi konsep intelektual di atas. Seharusnya universitas bisa menghasilkan orang-orang mempunya kepeculian terhadap apa saja yang terjadi di sekitarnya. Betapapun dalamnya ilmu yang dimiliki, tetapi kalau tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

tentu saja akan mubazir. Juga perlunya mereka terus membaca gejala dan fenomena yang tengah terjadi, sehingga ia dapat mengantisipasi setiap persoalan.

Universitas hendaknya bisa memainkan peran yang lebih konkret lagi dalam mengatasi berbagai permasalahan, terutama yang dihadapai oleh golongan bawah yang merupakan lapisan terbanyak masyarakat kita.

Melihat kenyataan beberapa dekade terakhir ada kecenderungan bahwa universitas justru semakin elitisme. Sehingga kehadiran perguruan tinggi tidak begitu dirasakan manfaatnya langsung bagi golongan bawah. Mereka melihat kampus sebagai lingkungan orang-orang yang mempunyai ekonomi mampu. Demikian pula halnya pada struktur makro perguruan tinggi sendiri, kegunaan hasil-hasil penelitian yang mereka lakukan tidak ada hungannnya sama sekali dengan kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat. Untuk itu perlu juga usaha-usaha untuk menterjemahkan penelitian dalam rumusan-rumusan yang begitu rumit untuk dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Sehingga manfaat dan nilai gunanya tidak semata-mata untuk kalangan terbatas, tetapi untuk semua lapisan masyarakat yang ada.

Sebagaimana kita ketahui bahwa universitas adalah lembaga otonom ilmiah, tempat beriteraksinya masyarakat ilmiah. Disana mereka melakukan proses belajar mengajar dan penelitian untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada. Tentu saja mereka mimiliki "etika ilmiah" tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat kampus; dosen dan mahasiswa.

Untuk menjaga etika ilmiah dan otoritas kampus kita mengenal istilah kebebasan akademis dan kebebasan mimbar akademis. Artinya kampus adalah lembaga otonom yang bebas membicarakan apa saja untuk mencapai kebenaran ilmiah yang diyakini. Tapi disisi lain semua itu tidak memberi kesempatan bagi universitas untuk berpolitik. Benarkah kampus tidak berpolitik ? Benarkah kampus tidak boleh berpolitik ?

Memang kampus atau PT adalah institusi pendidikan, bukan institusi politik, kalaiu mau menyalurkan aspirasi piolitik telah terserdia wadah resmi dan representatif yaitu partai atau ormas. Tetapi sejauh statemen ini bisa diterima, masih harus

tentu saja akan mubazir. Juga perlunya mereka terus membaca gejala dan fenomena yang tengah terjadi, sehingga ia dapat mengantisipasi setiap persoalan.

Universitas hendaknya bisa memainkan peran yang lebih konkret lagi dalam mengatasi berbagai permasalahan, terutama yang dihadapai oleh golongan bawah yang merupakan lapisan terbanyak masyarakat kita,

Melihat kenyataan beberapa dekade terakhir ada kecenderungan bahwa universitas justru semakin elitisme. Sehingga kehadiran perguruan tinggi tidak begitu dirasakan manfaatnya langsung bagi golongan bawah. Mereka melihat kampus sebagai lingkungan orang-orang yang mempunyai ekonomi mampu. Demikian pula halnya pada struktur makro perguruan tinggi sendiri, kegunaan hasil-hasil penelitian yang mereka lakukan tidak ada hungannnya sama sekali dengan kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat. Untuk itu perlu juga usaha-usaha untuk menterjemahkan penelitian dalam rumusan-rumusan yang begitu rumit untuk dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Sehingga manfaat dan nilai gunanya tidak semata-mata untuk kalangan terbatas, tetapi untuk semua lapisan masyarakat yang ada.

Sebagaimana kita ketahui bahwa universitas adalah lembaga otonom ilmiah, tempat beriteraksinya masyarakat ilmiah. Disana mereka melakukan proses belajar mengajar dan penelitian untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada. Tentu saja mereka mimiliki "etika ilmiah" tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat kampus; dosen dan mahasiswa.

Untuk menjaga etika ilmiah dan otonitas kampus kita mengenal istilah kebebasan akademis dan kebebasan mimbar akademis. Artinya kampus adalah lembaga otonom yang bebas membicarakan apa saja untuk mencapai kebenaran ilmiah yang diyakini. Tapi disisi lain semua itu tidak memberi kesempatan bagi universitas untuk berpolilik. Benarkah kampus tidak berpolitik ? Benarkah kampus tidak boleh berpolitik ?

Memang kampus atau PT adalah institusi pendidikan, bukan institusi politik, kalaiu mau menyalurkan aspirasi piolitik telah terserdia wadah resmi dan representatif yaitu partai atau ormas. Tetapi sejauh statemen ini bisa diterima, masih harus

diperdebatkan agi. Ada beberapa alasan kenapa hal tersebut diterima keseluruhannya. *Pertama*, tidak mungkin kiranya universitas "memisahkan diri" atau tidak pedoli sama sekali dengan permasalahaan dan persoalan masyarakat yang membutuhkan intelektual untuk ikut memikirkannya. Apalagi subsidi masyarakat terhadap perguruan tinggi sangat besar. Untuk itu keberadaan perguruan tingggi hendaknya dapat dan berfungsi bagi mereka. Dan dalam hal memecahkan pesoalan yang sedang terjadi, sebaiknya PT harus menujukkan keberpihakan kepada golongan bawah yang dalam banyak hal sering terabaikan dan tereksloitatif.

Kedua, pembangunan yang telah berjalan menimbulkan persoalan kurang diabaikannya masalah-masalah kemanusiaan. Memang untuk semua kita (masyarakat) harus mau untuk berkorban . Tetapi melihat kenyataan yang ada, kebayakan golongan yang berkorban dan dikorbakan adalah mereka yang berada pada golongan bawah. Peran perguruan tinggi betul-betul diharapkan untuk menanggulangi, baik pada tingkat praktis maupun dalam tingkat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Masalah *ketiga* adalah hampir tidak berfungsinya lembaga politik resmi, sehingga kebijakan pembangunan berjalan tanpa ada kontrol dari institusi politik yang ada. Akibat berbabagai peraturan perundang-undangan, partai politik selama Orde Baru telah mengalami kelumpuhan, sehingga tidak mengherankan kalau partai politik lebih memilih diam dan ikut mendukung kemapanan.

Demikian juga halnya dengan lembaga parlemen, tidak berfungsi secara maksimal sebagai lembaga legislatif. Banyak rakyat kecewa, dan kehilangan wadah untuk memuarakan aspirasi dan keinginann mereka. Marakanya ujuk rasa dan gelombang arus bawah akhir-akhir ini, setidaknya membuktikan beberapa golongan bawah tidak puas dengan sistem, politik dan institusi yang ada. Dalam keadaan seperti ini, wajar saja kalau rakyak banyak berharap kepada kaum intelektual (baik dosen maupun mahasiswa) untuk ikut terlibat menanggulangi persoalan dinamika masyarakat. Paling tidak kaum intelektual bisa memainkan peran yang lebih menonjol untuk menunjukkan kepedulian kepada rakyat bawah. Tentu saja peran mereka lebih diarahkan pada tingkat keputusan dan kebijakan politik pembangunan.

Membandingkan dinamika kampus sekarang ini dengan kondisi kampus pada awal-awal kelahiran Orde Baru masih menarik. Paling tidak kita menyadari betapa banyak perubahan yang terjadi, dimana mahasiswa makin elitisme dan apatis terhadap situasi sosial politik yang terjadi (?) Mahasiswa seakan sibuk berkonsentrasi semata-mata kuliah untuk mempersiapkan masa depan masing-masing. Kampus tidak lebih sebagai tempat pelatihan agar mereka siap dan terampil untuk memasuki dunia kerja dan bisnis.

Membicarakan keadaan kampus yang selama ini terkesan statis (paling tidak selama Orde Baru), tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang berlangsung. Sebab sebagaimana situasi dan kondisi yang berlangsung hanyalah konsekeuensi yang ditimbulkan. Sejak diberlakukan konsep NKK/BKK tahun 1978, kampus tidak lebih sekedar tempat belajar yang harus disterilkan dari isu-isu politik, dengan dalih bahwa politik adalah sesuatu yang "tabu" dibicarakan pada wadah ilmiah. Mahasiswa harus kembali ke kampus.

Tingginya kepedulian mahasiswa pada awal-awal Orde Baru, juga dipengaruhi oleh organisasi-organisasi ekstra kampus yang digeluti oleh mahasiswa. Adanya kebijakan pemerintah untuk memisahkan hubungan organisasi ekstra dengan lingkungan kampus menyebabkan, kampus terkesan melempem. Organisasi ekstra tidak dibolehkan masuk kampus, kecuali hanya berkiprah di luar kampus.Keadaan ini makin bertambah kompleks dengan diterapkannya sistem kredit semester di hampir semua perguruan tinggi, yang membuat mahasiswa sibuk bergulat dengan masalah-masalah perkuliahan semata. Apalagi dengan dikenakannya sanksi DO bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan studi pada batas waktu yang ditentukan. Sanksi tersebut betul-betul efektif untuk membuat mahasiswa hanya semata-mata kuliah dan tidak memikirkan masalah-masalah lain di luar perkuliahan. Artinya waktu masa studi betul-betul hanya digunakan untuk belajar dan kegiatan akademik lainnya. Mekanisme kemampuan mahasisswa dinilai dari IP (Indeks Prestasi) tanpa ada pertimbangan lain serta tidak adanya toleransi serta kelonggaran akademik bagi mereka yang aktif di kampus.

Hal ini membuat mahasiswa bersikap makin "rasional" untuk berusaha mencapai nilai akademis setinggi mungkin sehingga memudahkan mereka untuk berkeja nantinya.

Jadi yang mau untuk terlibat sebagai aktivis hanya segelintir mahasiswa. Itupun kadang-kadang harus bersedia menaggung segala "resiko" yang mungkin timbul, seperti nilai rendah, sulitnya mencari kerja (?) setelah tamat karena IP rendah, kekuatiran ancaman DO dan lain-lain. Itu mungkin hanya resiko kecil, belum lagi kemungkinan masuk penjara, diculik aparat keamanan karena dinilai vokal dan membahayakan negara.

Memperhatikan gejala yang fenomenal ini, dimana mahasiswa dinilai makin "steril", sebenarnya bukanlah sebuah gejala yang terjadi begitu saja, melainkan sesuatu yang dikondisikan. Persoalan ini lebih baik didekati dengan pendekatan struktural, memandang persoalan sebagai sesuatu yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Adanya hambatan strutural tersebut, meliputi sosial, ekonomi, politik yang menyebabkan timbulnya kondisi kampus seperti yang kita lihat sekarang. Hal yang sama bukan hanya terjadi pada mahasiswa , melainkan juga terjadi pada segenap lapisan civitas akademis, tak terkecuali staf pengajar dan guru besar.

VI. Penutup

Universitas khususnya, perguruan tinggi umumnya harus diarahkan untuk dapat menjadi ujung tombak perubahan dalam kerangka besar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak persoalan-persoalan timbul yang disebabkan pembangunan kurang mempertimbangkan masalah-masalah kemanusiaan, seyogianya dicatat sebagai pekerjaan yang segera harus dituntaskan.

Peran universitas masih dibutuhkan dalam menangani persoalan umum yang dihadapi masyarakat golongan bawah, apalagi ketika institusi politik resmi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk itu perguruan tinggi selayaknya harus secara bersungguh-sungguh memperhatikan aspek pengabdian masyarakat dalam pengertian seluas-luasnya.

Universitas sebagai perguruan tinggi yang melahirkan para pemimpin dan calon intelektual seharusnya tidak semata-mata terjebak sebagai "pabrik yang mencetak angkatan kerja". Memang kita memerlukan pendidikan yang *link and match*, tetapi

bukan berarti pendidikan melulu diperlakukan sebagai "pelayan" institusi lain; ekonomi, politik, pariwisata, mode fashion dan sebagainya. Apabila persoalan ini diabaikan, disamping akan menimbulkan krisis kepemimpinan generasi mendatang sekaligus terjadinya krisis intelektual pada segenap lapisan sosial yang selanjutnya akan makin menambah ketergantungan dunia pendidikan. Konsekuensinya selanjutnya akan bertambah nya kompleksitas permasalahan.

Untuk itu perlu diciptakan suatu kurikulum yang dapat menciptakan kemandirian dengan mempertajam landasan berpikir mahasiswa secara fleksibel. Sehingga setelah menamatkan perkualiahannya, mereka terampil tidak semata-mata tentang disiplin ilmunya. Mereka hendaknya juga bisa tahu tentang persoalan di luar disiplin ilmunya dan makin terbuka untuk melakukan mobilitas sosial setelah terjun ke masyarakat.

Kita mengharapkan dari sebuah universitas adalah lahirnya pemimpin yang memiliki kepedulian akan keberpihakan kepada persoalan-persoalan dan nasib golongan bawah yang selama ini kurang tersentuh oleh kemakmuran dan fasilitas pembangunan.

Bagaimanapun juga kehadiran intelektual dan mahaiswa sampai saat ini sangat diharapkan. Sehingga cita-cita proklamasi para *founding father* republik ini tidak semata-mata impian, tetapi betul-betul terwujud dalam realitas masyarakat yang lebih konkret hari ini. ■■■

Daftar Bacaan :

Baikoeni, Elfitra, "*Universitas dan Krisis Intelektual*", Makalah Diskusi FDP Fakultas Sastra, Universitas Andalas, Padang, 1993.

Buchori, Muchtar, "*Kesenjangan Pendidikan*", Harian Kompas 4 Maret 1991

Hartoko, Dick (Ed.), *Golongan Cendekiawan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.

Notosusanto, Nugroho, *Menegakkan Wawasan Alamamater*, UI Press, Jakarta, 1985

Raillon, Francois, *Politik dan Ideologi Mahasiswa*, LP3ES, jakarta 1985

Santoso Amir, "*Rektor dan Dekan dengan Baju Safarinya*, Harian Kompas, 26 Oktober 1989

Shill, DL, *International Ensyclopedia of Social Sciences*, Collier-Mac Millan Pulitzer, London.

Soedjatmoko, *Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa Depan*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta,1991.